

AKSES DAN DAMPAK PENYALURAN DANA BERGULIR LPDB KEMENTERIAN KUMKM PADA KOPERASI DI KOTA TANGERANG SELATAN

Dewi Rohma Wati¹

¹ Dosen Program Studi Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dewi.rohma.wati@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penggerak perekonomian negara yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas ekonomi rakyat. Namun perkembangan UMKM tidak lepas dari peran lembaga keuangan yang menyediakan permodalan yakni koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengidentifikasi karakteristik lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan; (2) menganalisis aksesibilitas koperasi pada pembiayaan LPDB di Kota Tangerang Selatan; (3) menganalisis dampak pembiayaan LPDB terhadap penyaluran kredit ke UMKM di Kota Tangerang Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menjawab tujuan pertama dan Model Seleksi Heckman untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh koperasi konsumen yakni sebanyak 69,5%. Dana bergulir dari LPDB KUMKM dapat diakses oleh koperasi di Kota Tangerang Selatan, namun hanya 3 koperasi yang berhasil menjadi mitra dari LPDB KUMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu lama berdirinya koperasi, jarak koperasi ke kantor LPDB, besaran dana bergulir yang disalurkan, dan jumlah modal milik koperasi sendiri. Dana bergulir dari LPDB KUMKM memberikan dampak positif bagi peningkatan usaha koperasi yang dicerminkan dari nilai aset dan sisa hasil usaha. Dampak terhadap sisa hasil usaha dipengaruhi oleh jumlah anggota koperasi, modal luar koperasi dan modal koperasi.

Keyword : akses, dana bergulir, koperasi, lembaga keuangan, pembiayaan

ABSTRAK

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are drivers of the country's economy that can absorb labor and improve the quality of the people's economy. However, the development of MSMEs typically linked to the role of financial institutions that provide capital, namely cooperatives. The objectives of this study are: (1) to identify the characteristics of financial institutions incorporated as cooperatives in South Tangerang City; (2) analyze the accessibility of cooperatives in financing Revolving Fund Management Institution (LPDB) in South Tangerang City; (3) analyze the impact of LPDB financing on lending to MSMEs in South Tangerang City. The analytical method used to answer the first objective is qualitative descriptive, and the Heckman Selection Model to answer the second and third goals. The results of the study showed that consumer cooperatives, namely 69.5% dominated cooperatives in South Tangerang City. Cooperatives can access revolving funds from LPDB KUMKM in South Tangerang City, but only three cooperatives have succeeded in becoming partners of LPDB KUMKM. The factors that had influence are the length of time the cooperative established, the distance of cooperatives to LPDB offices, the amount of revolving funds distributed, and the amount capital owned by the cooperative itself. Revolving funds from LPDB KUMKM have a positive impact on increasing cooperative business which showed in the value of assets and the remaining results of the business. The impact on the remaining business profit is affected by the number of cooperative members, cooperative capital, and cooperative capital.

Keyword: access, revolving funds, cooperatives, financial institutions, financing

PENDAHULUAN

(UMKM) menjadi penggerak perekonomian
Usaha mikro, kecil, dan menengah negara karena dapat menyerap tenaga kerja

dan memberikan kesempatan pada masyarakat kecil untuk lebih meningkatkan kualitas ekonominya. Struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM dengan proporsi mencapai 99,99% dari total unit usaha yang ada (Kemenkop&UMKM, 2014). Tahun 2013, jumlah UMKM sebanyak 57,90 juta unit dengan proporsi terbesar adalah usaha mikro mencapai 98,77%, usaha kecil sebanyak 1,13% dan usaha menengah sebanyak 0,09% (Kemenkop&UMKM, 2014). Penyerapan tenaga kerja dari berbagai sektor ekonomi juga didominasi oleh UMKM yakni sebanyak 97,22% dan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,34% (Kemenperin, 2016).

Konsentrasi Kementerian Koperasi dan UMKM tidak lain adalah mengembangkan UMKM sekaligus memberdayakan koperasi sebagai lembaga pembiayaan yang bisa diandalkan karena memiliki prosedur lebih mudah dibandingkan dengan perbankan namun bisa menjangkau sampai ke pelosok negeri. Koperasi dapat menyelesaikan permasalahan permodalan yang dihadapi oleh UMKM dengan lebih efektif dan efisien serta terjangkau di semua wilayah Indonesia. Dilihat dari sisi permodalan, secara keseluruhan mencapai Rp.115.174.190,15 juta yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp.35.794.284, Rp.64.000.000,- dan modal luar/pinjaman sebanyak Rp.39.689.952,51 juta (Kemenkop dan UMKM, 2016). Seperti halnya UMKM, koperasi juga mengalami

kendala dalam perolehan modal, karena tidak semua perbankan mau memberikan pembiayaan kepada koperasi apalagi jika aset yang dimiliki tidak memenuhi syarat. Ada banyak sumber pembiayaan yang dapat diperoleh koperasi selain bank, di antaranya modal ventura, sewa guna usaha, program kemitraan bina lingkungan (PKBL) dari BUMN, dana CSR, zakat, dan sebagainya.

Untuk lebih memberi dukungan kepada koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia, sejak tahun 2006, Kementerian Koperasi dan UMKM menyalurkan dana untuk UMKM termasuk di dalamnya koperasi melalui sebuah lembaga khusus yang disebut Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Lembaga ini bertugas mengelola dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM. Melalui penyaluran dana bergulir ini, tidak hanya koperasi yang akan diuntungkan tapi semua UMKM yang tergabung dalam keanggotaan koperasi juga turut menikmati fasilitas tersebut. Koperasi diarahkan untuk sebanyak mungkin menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan menjadi besar bersama koperasi itu sendiri karena sama-sama mengembangkan usaha.

Pemberdayaan UMKM dan koperasi diutamakan pada daerah yang memiliki potensi tinggi secara ekonomi. Salah satunya Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan memiliki potensi pengembangan UMKM yang sangat besar, mengingat lokasinya yang dekat dengan ibukota negara, Jakarta. Tabel 1 menyajikan data jumlah koperasi yang ada di Provinsi Banten baik yang aktif maupun tidak aktif.

Tabel 1. Jumlah Koperasi di Provinsi Banten dengan Status Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2011 – 2014

Tahun	Status Koperasi		Jumlah
	Aktif	Tidak Aktif	
2011	4.160	1.670	5.672
2012	3.787	2.163	5.950
2013	4.578	1.972	6.550
2014	3.897	2.439	6.336

Sumber: BPS (2015)

Dapat dilihat pada Tabel 1, bahwa jumlah koperasi di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan. Tapi dari sisi keaktifan, jumlah koperasi yang tidak aktif juga semakin banyak. Sama halnya dengan jumlah UMKM di Provinsi Banten juga terus meningkat dan bervariasi. Tahun 2014 tercatat terdapat 823.496 unit usaha mikro, 153.313 unit usaha kecil, dan 7.309 unit usaha menengah. Sebagian besar UMKM bergerak di bidang kuliner (30%), aksesoris dan *fashion* (10-20%), agroindustri, dan sebagainya (Bantenbangkit.com, 2016).

Akses permodalan untuk usaha produktif dapat diperoleh dari lembaga formal, semi formal, maupun informal (Nugroho dan O'hara, 2008; Wati, 2015). Namun bagi UMKM dan koperasi, lembaga keuangan formal tidak semuanya dapat dijangkau karena proses administrasi yang rumit dan persyaratan yang banyak, sehingga pilihan jatuh pada lembaga semi formal dan informal. Otoritas Jasa Keuangan

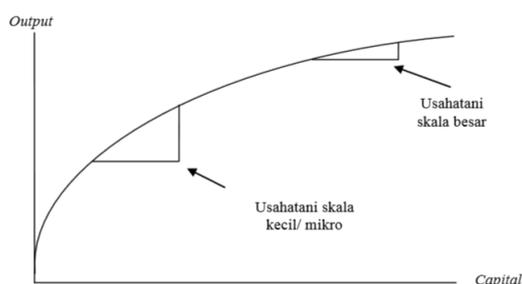
menyebutkan bahwa jumlah pembiayaan UMKM yang diakses dari perbankan hanya mencapai 19,09% dari total pembiayaan yang disalurkan (OJK, 2014). Untuk menutupi rendahnya akses terhadap lembaga formal, lembaga semi formal seperti koperasi menjadi sangat penting untuk dikembangkan sehingga bisa menyalurkan pembiayaan ke semua UMKM. Dari seluruh koperasi yang ada di Indonesia, potensi pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sangat tinggi. Melalui LPDB-KUMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM, banyak dana disalurkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana karakteristik lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan ?
2. Bagaimana aksesibilitas koperasi pada pembiayaan dana bergulir LPDB di Kota Tangerang Selatan ?
3. Bagaimana dampak pembiayaan LPDB terhadap Aset dan SHU koperasi di Kota Tangerang Selatan ?

Menurut UU No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara umum dibedakan dari besaran aset yang dimiliki. Usaha mikro umumnya tidak memiliki aset tetap yang bisa dijadikan agunan, sehingga tidak semua usaha mikro dapat dibiayai oleh perbankan dan mereka

membutuhkan lembaga lain yang dapat memfasilitasinya. Lembaga yang sangat memungkinkan adalah badan hukum koperasi yang didirikan oleh sekumpulan orang.

Sebuah usaha baik itu skala mikro maupun besar, akan berpengaruh jika diberikan tambahan modal. Namun dengan tambahan modal yang sama, dampak yang ditimbulkan akan lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sedangkan usaha besar, dampaknya relatif kecil (de Aghion dan Murdoch, 2005). Prinsip dasar yang digunakan adalah *diminishing of marginal return to capital* atau penurunan tambahan hasil (pendapatan/ output) terhadap modal (Gambar 1). Kondisi seperti ini yang ingin dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UMKM melalui penyaluran dana LPDB yang dilakukan oleh koperasi, lembaga yang lebih fleksibel dan berorientasi pada anggota. Adanya pembiayaan dengan skema yang mudah melalui koperasi, diharapkan dapat memberikan dampak besar kepada UMKM yang ada di Indonesia.



Sumber : de Aghion dan Murdoch, 2005

Gambar 1. Hubungan Input Modal Dengan *Marginal Return*

Koperasi dibangun atas dasar kepentingan bersama atas asas kekeluargaan antar anggota yang tergabung di dalamnya.

Koperasi memegang peranan penting dalam menggerakkan sektor ekonomi karena dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan dari anggota dan usaha yang dilakukan (Agustia, 2016). Sebelum Indonesia merdeka, koperasi telah dirintis oleh para pendahulu sejak tahun 1986 dan setelahnya diperdalam oleh proklamator, Bapak Mohammad Hatta dengan mempelajarinya di berbagai negara di Eropa. Akhirnya pada saat kemerdekaan telah diraih, Undang-undang Dasar 1945 memasukkan prinsip koperasi yang tercantum pada pasal 33 ayat (1). Lalu seiring berjalannya waktu, pemerintah mengesahkan Undang-undang mengenai koperasi yang masih terus digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan koperasi di Indonesia, yaitu UU No 25 tahun 1992 yang diperbaharui kembali menjadi UU No 17 Tahun 2012. Menurut undang-undang tersebut, koperasi diartikan sebagai suatu badan hukum yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ciri khas yang dimiliki anggota koperasi adalah dualisme identitas yakni sebagai pemilik dan pengguna. Hal ini menjadikan koperasi sebuah organisasi yang unik karena mengembangkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial (Baga *et al*, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan melibatkan beberapa stakeholder di dalamnya, yaitu Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan, dan Koperasi penerima dana LPDB. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni – September 2017. Populasi dari penelitian ini adalah semua koperasi yang sedang menerima dan tidak menerima bantuan dana bergulir LPDB Kementerian Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan. Adapun jumlah dari koperasi penerima Dana Bergulir sebanyak 3 koperasi selama tahun 2014 hingga 2017. Dikarenakan jumlah populasi koperasi penerima dana bergulir hanya 3, maka semua koperasi tersebut dijadikan sampel penelitian. Sedangkan sebagai pembanding koperasi yang tidak menerima dana bergulir, hanya dipilih 8 koperasi yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dari Kementerian Koperasi dan UMKM dengan kriteria tambahan adalah koperasi dengan nilai aset tertinggi di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 11 koperasi (3 koperasi penerima LPDB dan 8 koperasi yang tidak menerima dana dari LPDB).

Data yang digunakan berupa data kerat lintang (*cross section*) dari koperasi yang menerima dan tidak menerima dana bergulir LPDB di Kota Tangerang Selatan. Data diperoleh

dengan cara melihat laporan rapat akhir tahun (RAT) dari masing-masing koperasi. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menjawab tujuan pertama dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga digunakan *Heckman Selection Model* (Heckman 1976; Hopkins 2005; Ibrahim dan Bauer 2013). Model ini terdiri dari dua langkah yang terdiri dari dua persamaan yaitu *outcome equation* dan *selection equation*. Langkah pertama menggunakan model Probit (*selection equation*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi koperasi mengakses dana LPDB. Langkah kedua (*outcome equation*) ditempuh untuk menjawab tujuan kedua yakni melihat dampak yang ditimbulkan dari akses dana LPDB terhadap penyaluran pembiayaan ke UMKM di Kota Tangerang Selatan. Model Seleksi Heckman ini memperbolehkan penggunaan informasi dari persamaan seleksi pada tahap pertama yang diestimasi dengan menggunakan metode estimasi Likelihood maksimum (Ibrahim dan Bauer, 2013). Model ini lebih konsisten, estimasi efisien secara asimtotik untuk semua parameter dalam model. Untuk melihat kesesuaian model seleksi Heckman dilakukan uji parameter secara parsial dan serentak. Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel yang juga digunakan pada beberapa studi terdahulu mengenai akses pembiayaan yaitu Ibrahim dan Bauer (2013) sebagai berikut :

$$Z^* = \alpha_0 + \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \alpha_3 w_3 + \alpha_4 w_4 + \varepsilon_i \dots (1)$$

Keterangan :

- Z = Peluang akses dana bergulir LPDB
(1 = akses; 0 = tidak akses)
- α_i = parameter estimasi
- w_1 = lama berdirinya koperasi (tahun)
- w_2 = jumlah anggota koperasi (orang)
- w_3 = jumlah modal sendiri koperasi (Rp)
- w_4 = jarak dari kantor LPDB (km)
- w_5 = Besar pembiayaan LPDB (Rp)
- ϵ_i = variabel acak
- Tanda parameter : $\alpha_1, \alpha_2 > 0$; $\alpha_3, \alpha_4 < 0$

Dikarenakan model peluang melibatkan variabel tidak bebas yang dikotomis, maka semua variabel bebas dikonversi nilainya dalam bentuk logaritma untuk menghindari bias dan agar sesuai dengan metode estimasi yang digunakan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibrahim dan Bauer (2013) dan Wati (2015). Untuk menjawab tujuan kedua yakni dampak dana bergulir LPDB ke koperasi terhadap aset koperasi dan sisa hasil usaha (SHU) koperasi menggunakan *outcome equation*, yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + u \dots\dots (2)$$

Dimana :

- Y = Jumlah aset koperasi (Rp)
- x_1 = Pembiayaan LPDB (Rp)
- x_2 = Jumlah Anggota (orang)
- x_3 = Lama berdirinya koperasi (tahun)
- β_0 = konstanta
- β_i = parameter estimasi
- u_1 = variabel acak

Tanda parameter : $\beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + u \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

- Y = Sisa Hasil Usaha koperasi (Rp)
- x_1 = Pembiayaan LPDB (Rp)
- x_2 = Jumlah Anggota (orang)
- x_3 = Lama berdirinya koperasi (tahun)
- β_0 = konstanta
- β_i = parameter estimasi
- u_1 = variabel acak

Tanda parameter: $\beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0$

HASIL PEMBAHASAN

Karakteristik Lembaga Keuangan Berbadan Hukum Koperasi di Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, koperasi di Tangerang Selatan berjumlah 518 yang terdata aktif dan memberikan perannya terhadap masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha maupun bentuk jasa lainnya. Dari 518 koperasi yang aktif tersebut, terdapat sebanyak 63 koperasi yang sudah bersertifikat dan berkembang seiring dengan pemanfaatan jasanya bagi masyarakat dan UMKM di Kota Tangerang Selatan. Pentingnya koperasi memiliki sertifikat tidak lain menunjukkan kredibilitas dari koperasi itu sendiri dan tingkat perkembangan usaha yang terus meningkat serta semakin dipercaya oleh anggotanya. Berdasarkan pembagian wilayahnya, koperasi yang sudah bersertifikat berada di semua kecamatan namun belum merata. Tabel berikut menunjukkan sebaran koperasi di Kota Tangerang Selatan yang sudah tersertifikasi :

Tabel 2. Sebaran Koperasi Bersertifikat di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	%	Anggota
1	Ciputat	10	15,87	755
2	Ciputat Timur	6	9,52	1087
3	Pamulang	18	28,57	4035
4	Pondok Aren	5	7,94	728
5	Serpong	13	20,64	960
6	Serpong Utara	5	7,94	1399
7	Setu	6	9,52	2153
	Jumlah	63	100,00	11387

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2017)

Dilihat dari Tabel 2 di atas, koperasi yang sudah bersertifikat paling banyak berada di Kecamatan Pamulang dan Serpong. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi di wilayah tersebut memiliki kinerja yang relatif baik dan memiliki banyak anggota yang juga aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan

koperasi dan memanfaatkan fasilitas yang ada di koperasi. Banyaknya koperasi yang bersertifikat di Kecamatan Pamulang seiring juga dengan banyaknya anggota aktif yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan koperasi. Namun demikian, bukan berarti di kecamatan lain tidak aktif dan berkembang. Data juga menunjukkan bahwa di Kecamatan Pamulang menjadi salah satu pusat pengembangan UMKM di Kota Tangerang Selatan sejak dulu bahkan sebelum terjadi pemekaran menjadi wilayah administratif sendiri.

Selain koperasi yang sudah bersertifikat, koperasi yang belum memiliki sertifikat jumlahnya lebih banyak. Hal ini bukan berarti koperasi tersebut tidak memiliki kinerja yang baik atau tidak berkembang. Hanya saja masih dalam proses pengembangan dan membutuhkan waktu untuk bisa mengajukan sertifikasi ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Dari 518 koperasi aktif di Kota Tangerang Selatan, sebanyak 63 koperasi sudah bersertifikat, berarti selebihnya yakni sebanyak 455 koperasi belum memiliki sertifikat. Berikut sebaran koperasi di Kota Tangerang Selatan yang belum bersertifikat :

Tabel 4. Sebaran Koperasi yang Belum Bersertifikat di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	%
1	Ciputat	143	31,43
2	Ciputat Timur	13	2,86
3	Pamulang	98	21,54
4	Pondok Aren	55	12,09
5	Serpong	87	19,12
6	Serpong Utara	29	6,37
7	Setu	30	6,59
	Jumlah	455	100,00

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2017)

Karakteristik lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan tidak hanya terbagi atas yang sudah bersertifikat maupun yang belum. Tapi dibagi juga ke dalam bentuk dan jenis koperasi. Adapun ragam bentuk dan jenis koperasi di Kota Tangerang Selatan ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Bentuk dan Jenis Koperasi di Kota Tangerang Selatan

No	Bentuk Koperasi	Jumlah	%
1	Primer Kab/Kota	507	97,88
2	Primer Provinsi	1	0,19
3	Primer Nasional	9	1,74
4	Sekunder Nasional	1	0,19
	Jumlah	518	100,00
No	Jenis Koperasi	Jumlah	%
1	Konsumen	360	69,50
2	Produsen	69	13,32
3	Simpan Pinjam	69	13,32
4	Jasa	10	1,93
5	Pemasaran	10	1,93
	Jumlah	518	100,00

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2017)

Sebagian besar koperasi di Kota Tangerang Selatan yakni sebanyak 97,88 persen berbentuk primer tingkat kabupaten/kota. Bentuk koperasi yang demikian menandakan jangkauan kerja dan keberadaan anggotanya hanya pada wilayah Kota Tangerang Selatan. Selebihnya, koperasi di kota Tangerang Selatan berbentuk Primer tingkat Provinsi, primer nasional, dan sekunder nasional yang masing-masing hanya berjumlah 0,19, 1,74, dan 0,19 persen dari total koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, jenis koperasi hanya terbagi menjadi 4, yaitu konsumsi, produksi, simpan

pinjam, dan jasa. Namun pemerintah Kota Tangerang Selatan membaginya menjadi 5 jenis, yaitu konsumen, produsen, jasa, pemasaran, dan simpan pinjam. Hal ini karena ada perbedaan pada koperasi yang khusus bergerak dalam bidang pemasaran yakni koperasi di pasar-pasar tradisional. Sebanyak 69,90 persen koperasi di Kota Tangerang Selatan berjenis konsumsi. Dimana koperasi-koperasi tersebut memang memiliki usaha utama menyediakan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya baik dalam bentuk barang maupun uang. Umumnya koperasi ini berada di bawah instansi tertentu yang bisa secara otomatis juga menjadi anggota karena telah menjadi bagian dari instansi tempatnya bekerja atau tinggal.

Untuk mengakomodasi kebutuhan jasa keuangan bagi para produsen maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, terdapat juga koperasi yang diperuntukkan bagi produsen dan juga simpan pinjam dan masing-masing berjumlah 13,32 persen. Koperasi-koperasi tersebut dikhususkan bagi para anggota maupun non-anggota yang membutuhkan modal untuk usahanya dan umumnya tidak memiliki akses ke lembaga perbankan karena dianggap tidak *bankable*. Untuk itu koperasi dihadirkan dalam rangka memberikan pelayanan jasa keuangan terhadap usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga, kehadiran koperasi memberikan jalan buntu kepada para rentenir agar tidak memanfaatkan masyarakat kecil yang

kesulitan akses jasa keuangan.

Selebihnya, sebanyak masing-masing 1,93 persen koperasi di Kota Tangerang Selatan berjenis jasa dan pemasaran. Koperasi jasa bisa bergerak dalam usaha apa saja, seperti jasa pembayaran, jasa penjualan, dan sebagainya. Berbeda dengan jenis koperasi pemasaran yang umumnya mengutamakan para pedagang pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan, umumnya menyediakan kelengkapan akomodasi berupa kendaraan, penyewaan ruko/lapak, dan pembiayaan usaha. Namun karena dikhususkan untuk pedagang pasar, anggotanya pun harus orang-orang yang berjualan di pasar.

Semua koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan memiliki sumber pembiayaan yang berbeda-beda. Tergantung dari kebijakan pengurus dan kesepakatan anggota berdasarkan hasil Rapat Akhrit Tahun (RAT) yang diselenggarakan setiap tahun untuk melaporkan kinerja pengurus dan pengawas serta membagi-bagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) ke semua anggota dan pengurus. Ada koperasi yang hanya mengandalkan dana dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari semua anggota. Tapi ada juga koperasi yang mengambil pembiayaan dari lembaga lain baik perbankan maupun dana bantuan dari pemerintah yang digulirkan untuk menjalankan usaha dari koperasi tersebut. Salah satu lembaga yang memberikan dana bergulir bagi koperasi berasal dari Kementerian Koperasi dan UMKM

melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Dari sekian banyak koperasi di Kota Tangerang Selatan, terdapat 3 koperasi yang mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB KUMKM, yaitu Koperasi Airo Jaya Bersama, BMT Al-Munawarrah, dan BMT Al-Hurriyah. Ketiga koperasi tersebut memperoleh dana bergulir dengan jumlah yang beragam mulai dari 1 hingga 4 miliar rupiah. Pembahasan mengenai akses dan dampak dari adanya penyaluran dana bergulir dari LPDB dan perbandingannya dengan koperasi lain yang tidak memperoleh dana tersebut ada di sub bab berikutnya.

Akses Koperasi pada Pembiayaan dana bergulir LPDB KUKM di Kota Tangerang Selatan

Data yang digunakan secara deskriptif berdasarkan hasil analisis data menggunakan model seleksi Heckman dengan bantuan perangkat lunak STATA versi 13.0 ditampilkan dalam beberapa tabel. Tabel 6 memuat hasil analisis deskriptif variabel-variabel dalam model yang dibedakan pada koperasi-koperasi yang mengakses dan tidak mengakses pembiayaan LPDB.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian yang dibagi ke dalam 2 kategori yaitu koperasi yang mengakses dan yang tidak mengakses pembiayaan LPDB, diperoleh rata-rata lama berdiri koperasi adalah 14 tahun untuk yang tidak mengakses dan 10 tahun untuk yang mengakses. Variabel berikutnya mengenai jarak koperasi dari kantor LPDB, untuk yang tidak mengakses ternyata rata-rata jaraknya 30,625 km, lebih jauh dibandingkan dengan

koperasi yang mengakses LPDB yakni hanya 23 km. Hal ini dapat dijadikan alasan juga mengapa mereka tidak mengakses LPDB.

Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Variabel dalam Model

Variabel	Jumlah Obs	Rata-rata	Deviasi Standar
Tidak Akses LPDB			
Lama berdiri koperasi (tahun)	8	14,000	5,099
Jarak koperasi ke LPDB (Km)	8	30,625	8,847
Jumlah anggota koperasi (Orang)	8	357,625	413,060
Modal sendiri (Juta Rp)	8	5224,246	6090,314
Modal luar (Juta Rp)	8	11132,560	8042,218
Pembiayaan LPDB (Juta Rp)	8	0,000	0,000
Aset koperasi (Juta Rp)	8	16356,810	7803,205
Sisa Hasil Usaha (Juta Rp)	8	832,678	732,504
Akses LPDB			
Lama berdiri koperasi (tahun)	3	9,667	14,000
Jarak koperasi ke LPDB (Km)	3	23,000	25,000
Jumlah anggota koperasi (Orang)	3	160,667	200,000
Modal sendiri (Juta Rp)	3	2582,877	3236,780
Modal luar (Juta Rp)	3	10247,270	19452,800
Pembiayaan LPDB (Juta Rp)	3	1833,333	2000,000
Aset koperasi (Juta Rp)	3	12830,160	22032,590
Sisa Hasil Usaha (Juta Rp)	3	358,697	505,270

Sumber : Data penelitian (diolah)

Jumlah anggota koperasi yang tidak

mengakses rata-rata hampir dua kali lipat dari koperasi yang mengakses. Seharusnya kondisi ini lebih memberi kesempatan kepada koperasi tersebut untuk bisa mengakses pembiayaan LPDB sehingga dapat lebih mengembangkan layanannya ke anggota. Namun jika dilihat ke variabel modal dari luar koperasi, lembaga yang tidak mengakses justru memiliki banyak permodalan dari luar yang mungkin diperoleh dari perbankan atau sumber lainnya. Begitu pula dengan aset dan SHU yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi yang tidak mengakses memiliki aset dan SHU lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang mengakses.

Hal ini bisa memunculkan argumentasi bahwa, (1) koperasi yang tidak mengakses dana bergulir LPDB, lebih mampu mengakses permodalan ke perbankan dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan di LPDB. (2) koperasi tersebut belum mau mengajukan permodalan ke LPDB dan memilih menyelesaikan pelunasan modal ke lembaga lainnya. (3) Koperasi-koperasi tersebut telah mampu berdiri sendiri melalui partisipasi aktif anggotanya dan usaha yang dijalankan memberikan keuntungan yang banyak.

Untuk itu, lebih lanjut data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan model seleksi Heckman dimana akan terlihat bagaimana akses permodalan dari LPDB mempengaruhi aset dan juga SHU dari koperasi. Tabel 7 memperlihatkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak STATA 13.0 mengenai akses dan dampak dana

bergulir LPDB terhadap aset koperasi di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 7. Aksesibilitas Koperasi di Kota Tangerang Selatan Pada Dana Bergulir LPDB KUMKM

Variabel	Koefisien	Z	P> z
Lamanya koperasi berdiri (Tahun)*	0,72909	1,25	0,210
Jarak koperasi ke kantor LPDB (Km)**	-1,92452	-3,09	0,002
Jumlah anggota koperasi (orang)	0,09387	0,67	0,504
Besarnya dana bergulir LPDB (juta Rp)**	0,32635	5,14	0,000
Jumlah modal sendiri (Juta Rp)**	-0,97099	-6,41	0,000
Konstanta	2,47796	2,23	0,026
Wald chi ² = 94,75	Prob > chi ² = 0,0000		
Log pseudolikelihood = 0,8991294			

Sumber : Data primer

Keterangan : * signifikan pada taraf nyata 0,25,
 ** signifikan pada taraf nyata 0,05

Hasil analisis Model Seleksi Heckman tahap pertama (model Probit) yang diterapkan untuk mengetahui dampak akses dana bergulir LPDB terhadap aset koperasi dan sisa hasil usaha (SHU), diperoleh bahwa terdapat 4 faktor yang dapat menentukan akses koperasi terhadap dana bergulir LPDB (Tabel 7). Hal ini sesuai dengan hipotesis dimana variabel lamanya koperasi berdiri, jarak koperasi ke kantor LPDB, jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi, dan besaran dana bergulir LPDB dapat menentukan peluang petani dalam mengakses kredit mikro, sedangkan variabel jumlah anggota koperasi tidak menentukan akses petani terhadap dana bergulir LPDB (tidak signifikan secara statistik). Di antara faktor-faktor tersebut terdapat 2 variabel yang

mempengaruhi secara negatif untuk akses terhadap dana bergulir LPDB, yaitu jarak dari koperasi ke kantor LPDB dan kepemilikan modal sendiri, sedangkan dua variabel lainnya yaitu lama berdirinya koperasi dan besaran dana bergulir LPDB mempengaruhi akses permodalan dana bergulir secara positif.

Analisis regresi probit yang merupakan tahap pertama dari model seleksi Heckman dilakukan dengan bantuan perangkat lunak STATA 13.0, secara simultan diperoleh nilai rasio Wald Chi-square (Wald χ^2) yaitu sebesar 94,75 dan nilai $\text{prob} > \chi^2 = 0.000$ ($p < 0.05$). Jika H_0 = variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas dan H_1 = variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Dikarenakan $0.000 < 0.05$ maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Artinya setidaknya ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap peluang koperasi untuk mengakses dana bergulir LPDB. Pengujian parameter secara parsial dilakukan dengan uji Wald, variabel yang berpengaruh nyata pada taraf nyata 0,25 adalah lama koperasi dibentuk, jarak koperasi dengan kantor LPDB, besarnya dana bergulir LPDB, dan besarnya modal sendiri milik koperasi seperti yang terlihat pada Tabel 7.

Terdapat juga nilai Pseudo Likelihood sebesar 0,89 atau 89 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa akses dana bergulir LPDB dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada dalam model namun masih

ada variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model yang mungkin dapat menentukan akses dana bergulir LPDB. Di antara variabel yang diduga dapat mempengaruhi akses dana bergulir LPDB adalah lama koperasi dibentuk, jarak koperasi dengan kantor LPDB, besarnya dana bergulir LPDB, dan besarnya modal sendiri milik koperasi. Tabel 7 berikut menyajikan hasil penghitungan Modal Seleksi Heckman tahap pertama.

Lama berdirinya koperasi memiliki koefisien positif dan signifikan pada taraf nyata 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama koperasi berdiri dan beroperasi, semakin meningkatkan peluang koperasi tersebut untuk mengakses permodalan di LPDB KUMKM karena telah memiliki pengelolaan koperasi yang lebih stabil. Selain itu, semakin lama koperasi berdiri, menurut pandangan dari LPDB sendiri akan lebih terpercaya karena diberlakukan persyaratan minimal telah beroperasi selama 3 tahun sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Variabel jarak koperasi ke kantor LPDB memiliki koefisien negatif dan signifikan pada taraf 0,05. Hal ini berarti jarak yang jauh akan menjadi kendala dalam mengakses dana bergulir LPDB. Semakin jauh jarak, semakin rendah aksesnya. Walau demikian, LPDB tetap memiliki kewajiban bagi koperasi di seluruh Indonesia agar bisa dibantu

permodalannya sehingga bisa meningkatkan pelayanan pada semua anggotanya. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Koperasi dan UKM secara umum bahwa peningkatan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia, diamanatkan kepada instansi pemerintah tersebut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat.

Variabel berikutnya yang mempengaruhi akses dana bergulir LDPB adalah besarnya dana bergulir yang disalurkan ke koperasi. Semakin tinggi dana bergulir, semakin tertarik koperasi untuk mengaksesnya. Hal ini jika sejalan dengan kemampuan dari koperasi itu sendiri untuk menyediakan jaminan yang sebanding. Jika tidak, maka akan sulit juga untuk diberikan akses. Semakin tinggi dana bergulir, maka koperasi akan lebih banyak menyalurkannya kembali ke anggota untuk membiayai usaha-usaha produktif baik skala mikro, kecil, dan menengah.

Kepemilikan modal sendiri bagi koperasi, akan memberi pertimbangan untuk mengambil tambahan modal dari luar atau tidak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, besarnya modal yang telah dimiliki koperasi ternyata berpengaruh secara negatif dalam akses terhadap dana bergulir LPDB. Hal ini jelas demikian, karena jika koperasi sudah memiliki cukup modal untuk menjalankan usahanya, akan lebih aman jika mereka hanya fokus pada perputaran modal tersebut melalui usaha yang dijalankan oleh koperasi. Jika mereka mengambil

modal dari luar, maka dianggap akan memberi tambahan beban bagi koperasi karena harus memikirkan pengembalian modal tersebut.

Dampak Pembiayaan LPDB KUKM terhadap aset dan SHU koperasi di Kota Tangerang Selatan

Adanya akses terhadap dana bergulir tentunya memberikan dampak bagi koperasi yang menerimanya. Dalam penelitian ini dampak dari akses dana bergulir LPDB diperlihatkan dari jumlah aset dan sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model seleksi heckman tahap kedua yang diperlihatkan pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa beberapa variabel yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh pada kedua variabel dependen.

Tabel 8 Dampak Dana Bergulir terhadap Aset dan SHU Koperasi

Variabel	Koefisien
Dampak terhadap Aset Koperasi	
Jumlah anggota koperasi (orang)	-0,00934
Jumlah modal sendiri (juta Rp)	-0,25772
Jumlah modal luar koperasi (juta Rp)	0,82545
Jumlah SHU (juta Rp)	1,00729
Konstanta	5,32035
Dampak terhadap SHU Koperasi	
Jumlah anggota koperasi (orang)	0,15518
Jumlah modal sendiri (juta Rp)	0,61434
Jumlah modal luar koperasi (juta Rp)*	1,13378
Konstanta	3,40026

Sumber : Data penelitian (diolah)

Variabel jumlah anggota koperasi berpengaruh negatif terhadap aset koperasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin banyak anggota, maka akan banyak perputaran dana dalam koperasi yang menyebabkan pengumpulan aset tidak cepat jika ragam usaha koperasi tidak ditingkatkan. Namun demikian, aset terbesar dari sebuah

koperasi sebenarnya adalah anggota itu sendiri. Karena asal muasal dibentuknya koperasi adalah untuk menghimpun orang yang memiliki niat untuk meningkatkan perekonomiannya melalui koperasi yang mengelola dana bersama untuk dimanfaatkan bersama-sama pula.

Variabel berikutnya yang signifikan adalah modal luar koperasi. Pengaruh variabel ini positif karena semakin banyak koperasi memperoleh dana dari luar untuk tambahan modal, maka aset koperasi akan meningkat seiring dengan peningkatan volume usaha yang akan dijalankan jika telah memperoleh tambahan modal. Selama koperasi memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal dari luar tersebut dan usaha yang dijalankan koperasi memberikan banyak keuntungan, maka kekhawatiran akan mengancam aset koperasi akan semakin rendah.

Variabel lainnya yakni sisa hasil usaha, dimana semakin tinggi sisa hasil usaha pada akhir periode 1 tahun, maka jumlah aset akan meningkat. Sisa hasil usaha akan disisihkan untuk menambahkan modal dan atau digunakan untuk meningkatkan investasi dari usaha koperasi itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi di akhir tahun, sebagiannya pasti disisihkan untuk tambahan modal koperasi. Umumnya disisihkan sebesar 10 hingga 30 persen dari total SHU. Namun tidak semuanya menerapkan demikian.

Karena keputusan dikembalikan pada forum Rapat Akhir Tahun (RAT) yang dihadiri oleh semua anggota koperasi. Lain halnya dengan dampak terhadap perolehan sisa hasil usaha koperasi, dana bergulir LPDB secara umum memberikan dampak positif bagi koperasi. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model. Variabel pertama yakni jumlah anggota koperasi. Jumlah anggota koperasi memberikan dampak positif bagi peningkatan sisa hasil usaha. Hal ini dikarenakan jika semakin banyak anggota koperasi dan pelayanan usaha dimanfaatkan secara baik oleh anggota, maka perputaran dana di koperasi akan cepat dan memberikan keuntungan bagi koperasi itu sendiri. Usaha koperasi baik itu yang bersifat produktif maupun konsumtif, tetap akan memberikan keuntungan bagi koperasi selama dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan di awal. Demikian pula dengan koperasi yang menjadi objek penelitian kali ini, memiliki fokus pada usaha-usaha produktif dimana para anggotanya memanfaatkan jasa keuangan dari koperasi untuk meningkatkan usaha yang dijalaninya. Variabel berikutnya yakni banyaknya modal yang dimiliki oleh koperasi baik itu modal sendiri maupun dari luar. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh koperasi, maka akan lebih meningkatkan usaha koperasi itu sendiri sehingga bisa memberikan pelayanan keuangan kepada para anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini : (1) Koperasi di Kota Tangerang Selatan memiliki keragaman yang relatif tinggi dilihat dari bentuk dan jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi-koperasi tersebut. Namun yang lebih mendominasi adalah koperasi konsumen dengan jumlah 69,5 persen dari total koperasi yang ada.; (2) dana bergulir dari LPDB KUMK dapat diakses oleh koperasi di Kota Tangerang Selatan, namun masih dalam jumlah yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi yang ada. Sejauh ini hanya 3 koperasi yang berhasil menjadi mitra dari LPDB KUMK; (3) Dana bergulir dari LPDB KUMK memberikan dampak positif bagi peningkatan usaha koperasi yang dilihat dari nilai aset dan sisa hasil usaha koperasi. Variabel yang mempengaruhi aset koperasi sebagai dampak dari diaksesnya dana bergulir adalah jumlah anggota koperasi, modal dari luar koperasi, jumlah SHU. Sedangkan dampak terhadap sisa hasil usaha dipengaruhi oleh jumlah anggota koperasi, modal dari luar koperasi dan modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustia, Devi. 2016. Perilaku Usaha Koperasi Pertanian : Kasus Koperasi di Dataran Tinggi Gayo Provinsi Aceh. [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Indonesia 2016. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2016. Banten dalam Angka 2016. Banten.
- Baga, LM, Yanuar R, Feriyanto, Azis K. 2009. Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- De Aghion, BA dan J. Morduch. 2005. The Economics of Microfinance. London (UK) : The MIT Press.
- Hatta, Mohammad. 2015. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun : Gagasan dan Pemikiran Dr. Mohammad Hatta. Terbit Ulang. Jakarta : Kompas.
- Hopkins D. 2005. Heckman Selection Models. [Bahan Ajar]. Massachusetts (AS) : MIT.
- Ibrahim ALH and Bauer, S. 2013. Access to Micro credit and its Impact on Farm Profit Among Rural Farmers in Dryland of Sudan. *Global Advanced Research Journal of Agricultural Science*. Vol. 2 No. 3, pp: 88-102.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. 2014. Blueprint Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2015-2019. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. 2014. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013. Jakarta.
- Kementerian Perindustrian. 2016. Kontribusi UMKM Naik. Jakarta. Diunduh pada tanggal 30 April 2017. www.kemenperin.go.id/artikel/14200/kontribusi-UMKM-naik.
- Nugroho, AE dan P A. O'Hara. 2008. *Microfinance Sustainability and Poverty Outreach : A Case Study of Microfinance and Social Capital in Rural Java, Indonesia*. [Working Paper]. Perth : Global Political Economic Research Unit.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Perkembangan UMKM dan Akses UMKM terhadap Perbankan. Jakarta.
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 2017. Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan. Diunduh pada 1 November 2017 dari <https://www.tangerangselatankota.go.id>

d/main/content/index/visi_misi/3.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Perkoperasian.

Wati, Dewi Rohma. 2015. Akses dan Dampak
Pembiayaan Mikro terhadap Produksi
dan Pendapatan Usahatani Padi
Organik di Kabupaten Bogor. [Tesis].
Bogor : Institut Pertanian Bogor.